



## APBD Tembus Rp 5 Triliun Dewan Berharap Tak Stagnan Hanya Tahun 2017

### Mangupura (Bali Post) -

Janji Bupati Giri Prasta dan Wabup Suasa untuk meningkatkan APBD Badung mencapai Rp 5 triliun, ditepati pada tahun 2017 mendatang. Kalangan DPRD Badung pun terus

mendorong peningkatan APBD Badung tidak hanya stagnan di tahun 2017, namun setiap tahun bisa meningkat. Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Jumat (29/7) kemarin, mengungkapkan tembusnya APBD Badung mencapai Rp 5,01 triliun di tahun 2017 ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya.

"Kebijakan-kebijakan Bupati tersebut telah dituangkan dalam KUA dan PPAS. Di dalam rancangan tersebut telah dituangkan sejumlah program, di antaranya mendorong program peningkatan ekonomi mikro dengan UMKM-nya, ke-

mudian meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikannya dan kesehatan serta memberikan santunan kematian yang sangat berpihak kepada masyarakat. Ini adalah komitmen pemerintah dalam membangun Badung yang lebih sejahtera," ujarnya.

Lebih lanjut Parwata mengatakan, dengan tingginya APBD yang akan dicapai di tahun 2017, pihaknya juga meminta pihak Dispenda untuk mengoptimalkan sistem dan perangkat untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. "Online system harus dimaskinalkan dan hal ini butuh kerja sama antara eksekutif dan

legislatif untuk membangun Badung lebih baik. Begitu juga dengan Ranperda Layak Anak yang juga telah terakomodir dalam KUA dan PPAS, yakni bagaimana membentuk karakter anak dari kecil hingga dewasa agar mereka mendapat hak-hak

mereka, sehingga orangtua, masyarakat dan pemerintah bisa memberikan atensi khusus agar anak-anak kita memiliki moralitas yang kuat membangun bangsanya," terang politisi asal Desa Dalung, Kuta Utara tersebut. (kmb)

Edisi : Juli, 30 Juli 2015

Hal : 2



# Bedah Rumah Diharapkan Tuntas 2018

Gianyar (Bali Post) -

Rumah tidak layak huni kalangan masyarakat miskin di kabupaten Gianyar tergolong tinggi. Untuk itu, Pemkab Gianyar diharapkan bisa menggelontorkan program bedah rumah secara tepat sasaran dan merata di seluruh Gianyar. Diharapkan, program bedah rumah bisa dituntaskan tahun 2018 mendatang.

Ketua Komisi IV DPRD Gianyar Putu Gede Pebriantara tidak menampik tingginya rumah tidak layak huni di Gianyar. Dikatakan,

Pemkab Gianyar mulai 2016 ini baru menganggarkan bedah rumah untuk 120 KK, sebagai kelanjutan dari program sebelumnya. Kebijakan

ini tentunya harus disinkronkan dengan program bedah rumah dari Pemprov Bali. "Kalau bisa ini diprioritaskan di daerah yang terbanyak membutuhkan bedah rumah," katanya.

Berdasarkan data yang dikantonginya, saat ini masih tercecer sekitar 300 rumah yang diharapkan mendapat bantuan bedah rumah. Dikatakan bila data tersebut tidak

bertambah, ditargetkan pada 2018, semua yang tercecer itu sudah tuntas.

"Sebenarnya melalui pengalokasian dana tersebut, melewati 2017 dan 2018 sisa bedah rumah ini pasti tuntas. Tapi itu dengan catatan tidak ada lagi KK miskin yang baru," ujarnya.

Untuk diketahui, program bedah rumah tidak hanya ditangani Dinas Sosial. Di-

nas Pekerjaan Umum (PU) Gianyar juga melaksanakan program tersebut. Khusus Dinas PU, ditargetkan tiap tahunnya sekitar sepertiga dari jumlah usulan bedah rumah bisa direalisasikan di lapangan. Saat ini, Dinas PU Gianyar tengah menggarap tahap terakhir realisasi program bedah rumah yang dianggarkan di APBD induk 2016. (kmb35)

Edisi : Sabtu, 30 Juli 2016

Hal : 9



# Anggaran Pilgub Bali

## Dirancang Rp 254 Miliar



**I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi**

**Amlapura (Bali Post) -**

Bali sebentar lagi kembali memilih gubernurnya. KPU Bali sebagai penyelenggara sudah merancang anggaran mencapai Rp 254 miliar. Besaran anggaran ini cukup fantastis dan sudah mendapat lampu hijau dari Pemrov Bali. Ketua KPU Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan hal itu saat ditemui di Kantor KPU Karangasem, Kamis (28/7) lalu.

Dia menegaskan, rancangan anggaran tersebut sudah disodorkan kepada Pemprov Bali. Diskusi serius sudah dilakukan sejak Maret lalu. Secara normatif, dikatakan sudah disetujui sehingga tinggal pembahasan lebih detail lagi. Pihaknya meran-

cang anggaran sebesar itu, berdasarkan dasar hukum Permendagri dan Keputusan KPU nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium. Selain itu, juga Keputusan KPU nomor 44 tahun 2016 tentang Petunjuk Tennis Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium. "Jadi, variabelnya tentu berbeda, ada perubahan regulasi, sehingga ada perubahan-perubahan kewajiban yang harus dipenuhi KPU. Selain itu, satuan harganya tentu berbeda dengan tahun sebelumnya," katanya.

Besaran anggaran ini tampaknya menyusut dari rancangan awal. Saat awal Maret lalu, Ketua KPU Bali

mengatakan anggaran Pilgub Bali dirancang sebesar Rp 270 miliar. Anggaran Pilgub Bali yang dirancang sebesar itu sebagian besar digunakan untuk pembiayaan logistik, sosialisasi, honor ad hoc penyelenggara seperti Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungut Suara (PPS). Namun, bila dibandingkan hajatan Pilgub Bali sebelumnya, rancangan anggaran ini, kata dia, naik signifikan. Tapi, dia mengaku lupa berapa besaran anggaran saat Pilgub Bali sebelumnya.

Selain anggaran, berbagai persiapan lain juga sudah dilakukan, khususnya di KPU kabupaten/kota se-Bali. Salah satunya memaksimalkan

Rumah Pintar Pemilu di tiga tempat, antara lain di KPU Bali, KPU Tabanan dan KPU Karangasem. Tujuannya, untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, sebelum memasuki Pilgub Bali, persiapan KPU Bali akan diuji pada hajatan Pilkada Buleleng. "Kami sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pilkada Buleleng ini. Sudah melakukan supervisi. Pilkada Buleleng ini akan dilanjutkan dengan Pilgub Bali. Kami berharap ini berjalan dengan baik, sehingga imbasnya persiapan Pilgub Bali juga dapat berjalan dengan baik," tegas Ketua KPU Bali asal Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana ini. (kmb31)

Edisi : Sabtu, 30

Hal : B



## Antre, 57 Proposal Bedah Rumah

**Tabanan (Bali Post) -**

Program bedah rumah setidaknya masih menjadi perhatian sejumlah warga di Kabupaten Tabanan. Terbukti, sampai saat ini terdapat 57 proposal yang antre untuk bisa mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut. Ke-57 proposal tersebut nantinya akan dilakukan verifikasi untuk menentukan layak dan tidaknya mendapatkan bantuan bedah rumah.

Dari data Dinas Sosial Ta-

banan, jumlah RTS yang telah mendapat bantuan bedah rumah sejak awal tahun 2016 sebanyak 36 unit, yang anggarannya berasal dari APBD Tabanan senilai Rp 1,5 miliar. "Dari sasaran 46 unit, sudah terealisasi 36 unit dengan rincian, 18 unit di Kecamatan Penebel, Baturiti dan Marga. Sedangkan sisanya masing-masing 9 unit pengerjaan tahap II dan tahap III," ujar Kadisos Tabanan I Nyoman Gede Gunawan.

Pemkab Tabanan sendiri

sebenarnya sudah berupaya memberikan program bedah rumah sejak tahun 2012. Namun upaya itu belum mampu menuntaskan jumlah RTS di daerah lumbung beras Tabanan. Bahkan selama ini bantuan Pemprov Bali dari perusahaan berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dinilai sangat membantu meringankan beban pemerintah daerah.

Mantan Kadiscapilduk Tabanan ini mengatakan, bedah

rumah yang didanai dari APBD kabupaten ini tidak saja rumah ukuran 6 x 4,5 meter dengan fasilitas 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, namun juga diberikan fasilitas lainnya. Seperti satu kamar tidur dilengkapi tempat tidur, kasur, bantal dan lemari pakaian. "Rata-rata untuk program ini satu unit dianggarkan Rp 30 juta, lengkap dengan fasilitasnya," ujarnya.

Gede Gunawan menambahkan, untuk antrian tersebut

pihaknya juga sudah berupaya mengusulkan alokasi sisa anggaran di APBD perubahan 2016. "Sisanya kita prioritaskan di anggaran perubahan. Semoga ada anggaran tambahan sehingga cepat penyelesaian masalah bedah rumah ini," ujarnya.

Sementara dari 57 usulan yang masih masuk dalam daftar antre tersebut, nantinya masih harus melalui verifikasi. "Ada skala prioritas yang menjadi poin untuk mendapatkan pro-

gram ini, seperti terdaftar dalam daftar rumah tangga miskin dan masalah sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)," jelasnya.

Ditegaskannya, bantuan bedah rumah antara Pemkab Tabanan dan Pemprov Bali maupun bantuan dari CSR, selama ini tidak terjadi tumpang tindih. Karena antara Dinas Sosial Tabanan dan Dinas Sosial Provinsi Bali selalu berkomunikasi mengenai data

penerima bantuan bedah rumah. "Jadi tidak pernah ada data satu RTS menerima dobel bedah rumah. Karena data bedah rumah yang dipakai acuan oleh provinsi merupakan data rekomendasi dari dinas sosial Tabanan. Begitu juga dengan bantuan bedah rumah dari CSR perusahaan selalu terkoordinasi dengan baik. Tahun ini, dari Provinsi tercatat 136 unit dan CSR 24 unit," tegasnya. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 30 Juli 2016

Hal : 5



## Provinsi Belum Siap

# Ambil Alih Galian C

Denpasar (Bali Post) -

Urusan galian C sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota. Namun setelah terbitnya Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, galian C kini menjadi kewenangan provinsi. Hanya, pemerintah Provinsi Bali saat ini dinilai masih belum siap untuk alih kewenangan itu.

"Ada aturan, kewenangan dari kabupaten ke provinsi. Nah di provinsi kita belum siap, di tengah-tengah ini aturan penertiban itu ditegakkan oleh teman-teman dari aparat kepolisian," ujar Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, di gedung de-

wan, Jumat (29/7) kemarin.

Penertiban yang dimaksud, lanjut Wiryatama, terkait dengan galian C tak berizin atau ilegal. Hal ini berimbas pada kelangkaan material seperti batu dan pasir. Akibatnya, pengusaha konstruksi sebagai pengguna material itu menjadi resah tidak bisa menyelesaikan proyeknya tepat waktu. Terlebih pada proyek pemerintah yang berisiko menimbulkan denda, bahkan masalah pidana.

"Nah... kalau ini (galian C, red) dia belum punya izin baru akan mengurus izin, sampai izinnya selesai nanti mungkin proyek itu bisa lambat, sedan-

gkan tender sedang berjalan," jelas mantan Bupati Tabanan ini.

Wiryatama menambahkan, pihaknya ingin mendorong agar proyek pemerintah seperti pembangunan rumah sakit dan jembatan bisa berjalan tepat waktu. Tapi dari segi aturan, dalam hal ini menyangkut galian C juga bisa dipenuhi. Selain menyarankan Komisi III DPRD Bali turun ke lapangan, pemilik galian C ilegal juga diminta segera mengurus izin. Minimal mendaftarkan usahanya, daripada diam tidak melakukan apa-apa.

"Yang penting ada niatnya

dulu, dia daftar ngurus, kemudian kita akan sampaikan kepada Pak Gub mungkin di rapat Muspida Bali cobalah nanti kasi toleransi penertibannya ini, sampai proyeknya bisa selesai Desember lah," imbuhnya.

Wiryatama menegaskan, pihaknya akan berusaha mencari jalan keluar kalau memang ada kesulitan yang dihadapi saat mengurus izin galian C. Data dari Bidang ESDM Dinas PU Bali, di Bali hanya ada 58 usaha pertambangan yang berizin. Masing-masing di Karangasem sebanyak 30 usaha, Buleleng 20 usaha, dan Badung 8 usaha. Sementara yang tidak berizin

berjumlah 151 tersebar di seluruh kabupaten/kota. Terbanyak di Karangasem ada 50 usaha, Tabanan 40 usaha, dan Bangli 20 usaha. Di Tabanan khususnya, bahkan nihil usaha pertambangan yang berizin. (kmb32)

**"Ada aturan, kewenangan dari kabupaten ke provinsi. Nah di provinsi kita belum siap, di tengah-tengah ini aturan penertiban itu ditegakkan oleh teman-teman dari aparat kepolisian."**

Ketua DPRD Bali  
Nyoman Adi Wiryatama

Edisi : Sabtu, 30 Juli 2016

Hal : 7